

ANALISIS KINERJA KEUANGAN KABUPATEN JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR

Putri Evelyn Rokhim
NPP 30.0834

Asdaf Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur
Program Studi Keuangan Publik
E-mail: putrievelyna3@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Eljawati, S.sos, MM

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Regional government financial performance, the ability of a government to maximize regional revenue sources so that it is effective and efficient in the use of regional income and expenditure budgets. the percentage of the degree of decentralization of Jombang Regency in 2018-2022 is 19.4%, which means it is included in the less criteria. The reason is the small contribution of Local Original Income (PAD) and the target used for the determination of Local Original Income (PAD) is small so that the regional financial performance of Jombang Regency is still lacking to increase the receipt of Regional Original Income (PAD) which is used to finance the regional autonomy process. **Purpose:** This study aims to analyze the financial performance of the local government of Jombang district for the 2018-2022 fiscal year. **Method:** This study used a qualitative method with a descriptive approach and data collection used a descriptive method with an inductive approach. This study uses the theory of financial ratio analysis by mahmudi which is divided into the ratio of the degree of fiscal decentralization, the ratio of regional financial independence, the ratio of effectiveness and efficiency ratio of Regional Own Revenue. **Result:** The results of this study show that the ratio analysis of the degree of decentralization of 19.4% is included in the less criteria, the ratio analysis of regional financial independence is 24.6% which belongs to the low category of financial capacity and consultative relationship patterns, the ratio analysis of the effectiveness of the regional original income is 112.1% which means that the measurement of effectiveness belongs to the criteria of very effective. Analysis of the efficiency ratio of Local Own Revenue of 96% which is classified as less efficient criteria. Based on the results of research in Jombang Regency, Jombang Regency is still relatively low in supporting the implementation of regional autonomy but has increased every year. **Conclusion:** To overcome this problem, the researcher's suggestions are to re-optimize the increase in the intensification and extensification of sources of income according to the existing potential, optimizing regional tax revenues and regional levies, rotating employees by adjusting the areas of competence possessed by each employee and increasing the number of operators. competent in maximizing the use of applications related to regional financial information systems to make it easier to implement budgeting.

Keywords: Analysis, Financial Performance, Financial Ratio Analysis.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kinerja keuangan pemerintah daerah yakni kemampuan suatu pemerintah untuk memaksimalkan sumber penerimaan daerah agar efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah daerah kabupaten Jombang tahun anggaran 2018-2022, mengetahui faktor penghambat pelaksanaan kinerja keuangan, menjelaskan upaya dalam pelaksanaan kinerja keuangan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori analisis rasio keuangan oleh Mahmudi yang terbagi atas rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan rasio efisiensi Pendapatan Asli Daerah. **Hasil/Temuan:** penelitian ini menunjukkan analisis rasio derajat desentralisasi sebesar 19,4 % termasuk ke dalam kriteria kurang, analisis rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 24,6% yang tergolong pada kemampuan keuangan kategori rendah dan pola hubungan konsultatif, analisis rasio efektivitas pendapatan asli daerah sebesar 112.1% yang artinya pengukuran efektivitas tergolong pada kriteria sangat efektif. Analisis rasio efisiensi Pendapatan Asli Daerah sebesar 96% yang tergolong pada kriteria kurang efisien. **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Jombang, di Kabupaten Jombang tergolong masih rendah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah namun mengalami peningkatan setiap tahunnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut saran peneliti yakni dengan mengoptimalkan kembali peningkatan terhadap intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai potensi yang ada, mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, rotasi pegawai dengan menyesuaikan bidang kompetensi yang dimiliki dari setiap pegawai dan menambah jumlah tenaga operator yang lebih berkompeten dalam memaksimalkan penggunaan aplikasi yang berkaitan dengan sistem informasi keuangan daerah agar lebih mempermudah pelaksanaan penganggaran.

Kata kunci : Analisis, Kinerja Keuangan, Analisis Rasio Keuangan.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 membahas Pemerintahan Daerah dimana Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah berdasarkan pada asas-asas penyelenggaraannya, yang terbagi atas asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Desentralisasi terbagi menjadi tiga aspek wajib yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah yakni desentralisasi politik, desentralisasi administrasi, dan desentralisasi fiskal. Ketiga asas tersebut merupakan komponen utama pelaksanaan desentralisasi dalam rangka membangun daerah mengelola sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kemajuan daerah.

Peraturan perundang-undangan tersebut sudah diberlakukan maka pemerintah daerah bertindak sebagai pelaku utama diharapkan mampu mengimplementasikan setiap kebijakan yang mendukung pembangunan ekonomi. Penyelenggaraan dari fungsi pemerintahan daerah tersebut dapat dilaksanakan secara maksimal jika diikuti dengan cukup. Pemerintah daerah memperoleh

pendapatan melalui perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui dana transfer dari Pemerintah pusat untuk melaksanakan tugas dan kewajiban daerah. Pembiayaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur berdasarkan pada kebijakan desentralisasi fiskal. Dimana desentralisasi fiskal merupakan penyerahan kewenangan serta tanggung jawab fiskal yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Penyelenggaraan desentralisasi fiskal memberikan keleluasaan untuk daerah dalam mengelola keuangan daerah dapat berjalan dengan optimal dan kinerja keuangan pemerintah daerah semakin meningkat.

Agar kinerja keuangan pemerintah daerah mengalami peningkatan secara kondusif, pada pelaksanaan desentralisasi fiskal dapat menyertakan sumber-sumber pendanaan yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, serta pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain lain pendapatan daerah yang sah yang biasanya disebut dengan sumber-sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan PAD menunjukkan pertanda baik bagi penerimaan daerah dalam melakukan pengelolaan terhadap rumah tangganya sendiri.

Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah memberikan gambaran mengenai kemampuan keuangan daerah membiayai kegiatan pemerintahan otonom secara mandiri. Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah salah acuan ketersediaan dana yang dalam pengelolaan keuangan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar memperlihatkan tingginya kemandirian suatu daerah dalam membiayai urusan pemerintahan otonom. Sebaliknya, suatu daerah belum bisa dikatakan mandiri apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai urusan pemerintahannya masih rendah. Dana transfer yang diperoleh dari Pemerintah Pusat dapat dikatakan sebagai pendorong bagi daerah agar tergerak dalam melakukan peningkatan usaha untuk pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara maksimal.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Pemerintah Kabupaten Jombang merupakan salah satu Pemerintah daerah yang melaksanakan kewenangan pemerintahan pada kabupaten/kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berikut tabel yang menunjukkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Jombang :

Tabel 1
Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan
Kabupaten Jombang (dalam milyaraan rupiah)

Tahun	Pendapatan Daerah (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi PAD (%)
2018	2.512,79 M	438,20 M	17,43 %
2019	2.672,35 M	476,66 M	17.83 %
2020	2.538,50 M	468,63 M	18.45 %
2021	2.883,53 M	665,84 M	23.1 %
2022	1.793,19 M	343,84 M	19.17%

Sumber : BPKAD Kabupaten Jombang

Data diatas menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Jombang merupakan kabupaten dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang kenaikannya tidak stabil. Hal ini mengakibatkan penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2021 ke 2022 yakni 23,1% yang dikategorikan cukup menjadi 19,17% yang dikategorikan kurang, selain itu pada tahun 2020 dan 2021 mengalami peningkatan yang cukup drastis yakni dari 18.45% yang dikategorikan kurang menjadi 23.1% yang dikategorikan cukup.

Tabel 2
PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Kabupaten Jombang
(dalam milyaraan rupiah)

Tahun	PAD	Dana Perimbangan	Belanja
2018	438,20 M	1.577,76 M	2.354,11 M
2019	476,66 M	1.620,56 M	2.653,74 M
2020	468,63 M	1.536,18 M	2.527,28 M
2021	665,84 M	1.857,97 M	2.785,98 M
2022	343,84 M	1.302,35 M	1.293,63 M

Sumber : BPKAD Kabupaten Jombang

Tabel diatas menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang sangat kecil dibandingkan dana perimbangan dari pusat. Belanja daerah Kabupaten Jombang masih dibiayai dari dana perimbangan yang berasal dari pusat dikarenakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang masih rendah sehingga belum bisa memenuhi kebutuhan belanja daerahnya.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya atau terdahulu yang berkaitan dengan pengukuran, kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan rasio keuangan daerah. Penelitian dalam jurnal yang ditulis oleh Heri Faisal Harahap yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menganalisis tingkat kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dengan menggunakan analisis rasio keuangan (Harahap, 2020). Mega Oktavia Ropa juga melakukan penelitian dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Ropa, 2016). Meilany S.D.Liow melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Kota-Kota yang Ada di Provinsi Sulawesi Utara (Liow et al., 2019). Muhammad Zuhri melakukan penelitian dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur (Zuhri & Soleh, 2016). Nurul Amin juga melakukan penelitian dengan judul Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah (Amin, 2015).

1.4 Pernyataan Kebaharuan Ilmiah

Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini yaitu berfokus pada pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jombang dengan menggunakan rasio keuangan daerah. Rasio keuangan daerah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu beberapa rasio yang mewakili unsur

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, baik dalam unsur penerimaan maupun pengeluaran yang berupa kewajiban dan belanja.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan dan faktor yang menghambat kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jombang tahun anggaran 2018-2022 berdasarkan analisis rasio keuangan daerah, serta mengetahui upaya pemerintah dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jombang.

II. METODE

Penelitian analisis rasio keuangan daerah dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jombang ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu berupa data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang berasal dari dokumen atau catatan berupa laporan realisasi anggaran. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

III. HASIL dan PEMBAHASAN

a. Kinerja Keuangan Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur

Penulis melakukan perhitungan untuk mengetahui kinerja keuangan dengan menggunakan analisis rasio keuangan daerah yang dikemukakan oleh (Mahmudi, 2010) yaitu sebagai berikut:

A. Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio Desentralisasi berfungsi untuk mengetahui bagaimana cara pemerintah memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber pendapatan terbesar bagi daerah. Rasio Derajat Desentralisasi pemerintah daerah Kabupaten Jombang dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Persentase derajat desentralisasi kemudian dikategorikan dalam kriteria derajat desentralisasi, berikut tabel kriteria desentralisasi:

Tabel 3
Kriteria Derajat Desentralisasi

Persentase (%)	Kriteria
1	2
00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Cukup
30,01 – 40,00	Sedang
40,01 – 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: (Halim, 2004)

Berdasarkan dokumen LRA Kabupaten Jombang tahun 2018-2022 didapatkan :

Tabel 4
Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten Jombang 2018-2022

Tahun	Pendapatan Daerah (Rupiah)	Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)	Rasio Derajat Desentralisasi (%)	Kriteria
1	2	3	4	5
2018	2,512,786,629,845.60	438,197,175,438.60	17	Kurang
2019	2,668,375,769,409.46	476,662,933,476.46	18	Kurang
2020	2,538,496,472,277.89	468,627,918,703.89	18	Kurang
2021	2,883,526,219,043.24	665,844,012,375.24	23	Cukup
2022	2,163,783,910,055.13	456,047,997,561.13	21	Cukup

Sumber: Diolah penulis dari Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Jombang 2018-2022

Rasio derajat desentralisasi Kabupaten Jombang tahun 2018 sebesar 17% mengalami peningkatan ditahun 2018 sebesar 18% dan pada tahun 2019 tidak mengalami peningkatan tetap sebesar 18% sedangkan tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 23% namun di tahun 2022 terjadi penurunan yakni 21%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persentase derajat desentralisasi Kabupaten Jombang tahun 2018-2022 sebesar 19,4 %. Kinerja Derajat Desentralisasi nilai 19,4% termasuk ke dalam kriteria kurang. Penyebabnya yakni kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kecil dan target yang digunakan untuk ketetapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kecil sehingga kinerja keuangan daerah Kabupaten Jombang masih kurang untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai proses otonomi daerah.

B. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian ini juga berfungsi untuk menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi secara tertib, dimana pajak merupakan komponen utama dalam pendapatan asli daerah. Rasio Kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 5
Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah sekali	0%-25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultatif
Sedang	50%-75%	Partisipasif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

Sumber : Halim,(2004)

Berdasarkan dokumen LRA Kabupaten Jombang tahun 2018-2022 didapatkan :

Tabel 6
Rasio Kemandirian Kabupaten Jombang 2018-2022

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)	Pendapatan Eksternal (Rupiah)	Rasio Derajat Desentralisasi (%)	Kriteria	Pola Hubungan
1	2	3	4	5	
2018	438,197,175,438.60	2,074,589,454,407.00	21	Rendah sekali	Instruktif
2019	476,662,933,476.46	2,191,712,835,933.00	22	Rendah sekali	Instruktif
2020	468,627,918,703.89	2,069,868,553,574.00	23	Rendah sekali	Instruktif
2021	665,844,012,375.24	2,217,682,206,668.00	30	Rendah	Konsultatif
2022	456,047,997,561.13	1,707,735,912,494.00	27	Rendah	Konsultatif

Sumber: Diolah penulis dari Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Jombang 2018-2022

Perhitungan diatas menunjukkan rasio kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang terus mengalami peningkatan yang cukup tinggi ditahun 2021 sebesar 30% namun pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 3% dari tahun sebelumnya. Jadi rata-rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Jombang tahun 2018-2022 sebesar 24,6% yang tergolong pada kemampuan keuangan kategori rendah dan pola hubungan konsultatif dalam hal ini campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu, dalam melaksanakan otonomi daerah.

C. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi daerah. Rasio efektivitas Pemerintah Kabupaten Jombang dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 7
Pengukuran Efektivitas

Persentase (%)	Kriteria
1	2
>100 %	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif

1	2
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Halim, (2004)

Berdasarkan hasil perhitungan dari dokumen LRA Kabupaten Jombang tahun 2018-2022 didapatkan hasil :

Tabel 8
Perhitungan Rasio Efektivitas Tahun 2018-2022

Tahun	Target Penerimaan PAD	Realisasi Penerimaan PAD	Rasio Efektifitas
2018	427,379,057,690.85	438,197,175,438.60	102.53%
2019	443,060,153,764.39	476,662,933,476.46	108%
2020	420,900,051,055.05	468,627,918,703.89	111%
2021	470,650,315,687.00	665,844,012,375.24	141%
2022	465,550,573,089.00	456,047,997,561.13	98%

Sumber: LRA Kabupaten Jombang

Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang terus mengalami peningkatan namun pada tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup drastis menjadi 98% yang sebelumnya ditahun 2021 sebesar 141%. dan rata-rata rasio efektivitas pada tahun anggaran 2018-2022 sebesar 112.1% yang artinya pengukuran efektifitas tergolong pada kriteria sangat efektif kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

D. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi Keuangan Daerah menggambarkan perbandingan antara realisasi besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan daerah yang diterima. Rasio efisiensi keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Jombang dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Setelah diperoleh persentase dari rasio efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara umum, nilai efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 9
Pengukuran Efisiensi

Persentase (%)	Kriteria
1	2
<60 %	Sangat Efisien
60-80%	Efisen
80-90%	Cukup Efisen
90-100%	Kurang Efisen
>100%	Tidak Efisen

Sumber : Halim, (2004)

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.8
Perhitungan Rasio Efisiensi Tahun 2018-2022

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah	Rasio Efisiensi
2018	2,354,108,953,698.38	2,512,786,629,845.60	94%
2019	2,177,907,400,695.47	2,668,375,769,409.46	82%
2020	2,030,845,567,427.97	2,538,496,472,277.89	80%
2021	2,785,980,355,229.10	2,883,526,219,043.24	97%
2022	2,752,263,707,761.82	2,163,783,910,055.13	127%

Sumber: LRA Kabupaten Jombang

Rasio efisiensi keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Jombang bahwa rata-rata rasio efisiensi Pemerintah daerah Kabupaten Jombang yakni 96% jika dilihat pada tabel pengukuran efisiensi termasuk kedalam kriteria Kurang Efisien. Dengan tingginya pembelanjaan daerah dari pada penerimaannya maka rasio yang dihasilkan semakin kecil sehingga Pemerintah Kabupaten Jombang dalam membiayai seluruh program kegiatan perlu untuk dikelola dan ditingkatkan kembali.

b. Faktor Penghambat Kinerja Keuangan Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur

Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Jombang:

a. Sumber Daya Manusia

Hasil perhitungan dari rasio efisiensi menunjukkan kinerja Keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jombang dalam kategori kurang efisien hal tersebut disebabkan oleh kurangnya kualitas sumber daya manusia seperti operator yang dapat mengoperasikan aplikasi sistem informasi keuangan yang dapat memudahkan dalam pengelolaan anggaran.

b. Potensi Daerah Kabupaten Jombang Belum dimanfaatkan Secara optimal Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang

Perlu mengoptimalkan pemanfaatan berbagai potensi daerah yang ada di Kabupaten Jombang. Kabupaten Jombang memiliki kondisi geografis yang terdiri dari daratan dan pergunungan. Selain itu pemerintah Kabupaten Jombang memiliki obyek wisata yang kurang diperhatikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Jombang. Perlunya perhatian pemerintah dalam kegiatan pemerliharan obyek wisata tersebut sehingga dapat dinikmati oleh warga masyarakat setiap tahunnya sehingga dapat meningkatkan PAD.

c. Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang Bergantung Terhadap Dana Transfer

Ketergantungan pemerintah Daerah Kabupaten Jombang terhadap dana transfer yang berasal dari pusat sangat tinggi jika dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang. Hal tersebut dapat dilihat dari pada anggaran pendapatan Kabupaten Jombang tahun anggaran 2018-2022 masih bergantung dan sangat didominasi oleh besarnya kontribusi dana yang berasal dari pihak eksternal, dimana pemerintah pusat berperan besar dalam memfasilitasi kegiatan dan program pemerintah daerah Kabupaten Jombang.

c. Upaya Untuk Meningkatkan Kinerja Keuangan Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas sumber daya manusia di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sangat penting mengingat setiap kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten sesuai dengan bidangnya.

Sikap jujur, kerja keras, dan kreatif sangat diperlukan oleh aparatur perpajakan. Apabila sikap tersebut diterapkan tidak menutup kemungkinan bahwa rasio-rasio yang berkaitan dengan keuangan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah dapat meningkat secara signifikan, dikarenakan beberapa daerah di Indonesia menyebutkan bahwa salah satu penghambat dari rasio-rasio keuangan daerah disebabkan oleh kurang jujurnya sikap para aparat perpajakan.

2. Melakukan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah

Ekstensifikasi merupakan usaha menggali sumber pendapatan baru yang sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga Pendapatan Asli Daerah dapat meningkat sehingga ketergantungan terhadap pemerintah pusat dapat diminimalisir atau kemandirian keuangan daerah dapat tercapai. Meliputi mencari sumber pembiayaan dari pusat serta menerbitkan perda-perda baru yang sesuai dengan sumbernya.

Intensifikasi merupakan proses meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah dari sumber yang telah digali secara giat dan teliti. Sumber-sumber pajak daerah tersebut berasal dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak biaya perolehan hak atas bangunan (BPHTB) dan pajak bumi dan bangunan kabupaten. Upaya peningkatan pajak daerah yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Jombang melalui intensifikasi sudah cukup optimal.

3. Memaksimalkan Pendapatan yang Bersumber dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah melalui kekayaan daerah yang dipisahkan untuk dijadikan penyertaan modal Badan Usaha Milik Daerah. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada di Kabupaten Jombang antara lain PT BPR Bank Jombang (Perseroda), Perumda Perkebunan Panglungan, Perumda Aneka Usaha Seger, Perumda Air Minum Tirta Kencana.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Analisis rasio keuangan daerah yang dilakukan dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jombang ini menunjukkan bahwa hasil dari analisis Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten Jombang disimpulkan bahwa rata-rata presentase derajat desentralisasi Kabupaten Jombang Tahun 2018-2022 sebesar 19,4% termasuk kedalam kriteria kurang. Hasil dari analisis Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Jombang disimpulkan bahwa rata-rata persentase Rasio Kemandirian Keuangan Daerah kategori rendah dan pola hubungan konsultatif, Hasil dari analisis Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang dapat disimpulkan bahwa rata-rata perhitungan rasio efektivitas tahun 2018-2022 yakni 112.1% yang termasuk dalam kategori sangat efektif, Hasil dari analisis Rasio efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Jombang disimpulkan bahwa rata-rata rasio efisiensi Pemerintah daerah Kabupaten Jombang yakni 96% jika dilihat pada tabel pengukuran efisiensi termasuk kedalam kriteria Kurang Efisien.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan factor-faktor yang menghambat kinerja keuangan pemerintah daerah dan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah terutama pada Kabupaten Jombang. Dana transfer yang tergolong tinggi ini merupakan hal yang tidak terduga bagi peneliti melihat besarnya potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Jombang.

IV. KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang yang diukur menggunakan analisis rasio kinerja keuangan daerah dapat dikategorikan kurang baik. dilihat berdasarkan hasil rasio dari indikator kinerja keuangan sebagai berikut: Hasil dari analisis Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten Jombang disimpulkan bahwa rata-rata presentase derajat desentralisasi Kabupaten Jombang Tahun 2018-2022 sebesar 19,4% termasuk kedalam kriteria kurang. Hasil dari analisis Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Jombang disimpulkan bahwa rata-rata persentase Rasio Kemandirian Keuangan Daerah kategori rendah dan pola hubungan konsultatif, Hasil dari analisis Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang dapat disimpulkan bahwa rata-rata perhitungan rasio efektivitas tahun 2018-2022 yakni 112.1% yang termasuk dalam kategori sangat efektif, Hasil dari analisis Rasio efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Jombang disimpulkan bahwa rata-rata rasio efisiensi Pemerintah daerah Kabupaten Jombang yakni 96% jika dilihat pada tabel pengukuran efisiensi termasuk kedalam kriteria Kurang Efisien.
2. Faktor penghambat kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur, yaitu sebagai berikut :
 - a. Sumber daya manusia
 - b. Potensi daerah Kabupaten Jombang yang belum dimanfaatkan secara optimal
 - c. Pemerintah daerah Kabupaten Jombang bergantung terhadap dana transfer

3. Upaya untuk meningkatkan kinerja keuangan Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur, yaitu sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
 - b. Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan asli daerah
 - c. Memaksimalkan pendapatan yang bersumber dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Mahmudi.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*): Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan analisis kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti akan memberikan saran kepada pemerintah daerah Kabupaten Jombang dengan harapan memberikan peningkatan kinerja keuangan Kabupaten Jombang. Saran-saran tersebut adalah:

1. Pemerintah Kabupaten Jombang untuk meningkatkan kinerja keuangan harus lebih mengoptimalkan kembali pemungutan sumber Pendapatan Asli Daerah terutama pajak dan retribusi daerah melalui sosialisasi wajib pajak, menambah aparat dalam hal memungut pajak dan retribusi serta melakukan pengawasan oleh pimpinan termasuk pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan internal pemerintah daerah.
2. Pemerintah Kabupaten Jombang dalam mengatasi faktor penghambat untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan cara mengikuti diklat atau pelatihan bagi para Aparatur Sipil Negara yang diadakan oleh pemerintah pusat atau provinsi kemudian memaksimalkan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara membuat inovasi terkait pemungutan pajak daerah agar pemerintah tidak bergantung pada dana transfer dari pusat dilakukan dengan cara menggali potensi daerah yang baru untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. menyusun program kegiatan atau strategi dalam menggali objek pungutan baru sedangkan intensifikasi pendapatan daerah dilakukan melalui penyempurnaan prosedur pemungutan seperti pajak ataupun retribusi daerah.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih terutama ditujukan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan, sehingga bisa melakukan penelitian dengan baik dan lancar. Kemudian kepada keluarga khususnya orang tua yang selalu mendoakan dan mendukung dalam setiap hal yang dilakukan peneliti demi kelancaran penelitian. Terimakasih disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah membantu, mengarahkan, dan membimbing hingga tuntasnya penelitian ini. Terimakasih kepada seluruh pihak Badan Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang yang telah berkenan menjadi lokus penelitian dan berkenan meluangkan waktu untuk penelitian ini. Serta terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendoakan kelancaran penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Amin, N. (2015). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kabupaten Bengkalis. *Iqtishaduna*, 80–91. <https://ejournal.stiesyariah Bengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/64>

Halim, A. (2004). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah* (Revisi Kes). Penerbit UPP AMP YKPN.

Harahap, H. F. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 34. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.87>

Liow, M. S. ., Kindangen, P., & Engka, D. S. M. (2019). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Kota-Kota Yang Ada Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 20(01), 14–25. <https://doi.org/10.35794/jpek.d.23450.20.01.2019>

Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN.

Ropa, M. O. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(2), 738–747.

Zuhri, M., & Soleh, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 187–195. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v4i2.284>